

Buaya 4 Meter Hebohkan Warga Cibodas Tangerang

TANGERANG (IM)- Warga Taman Cibodas, Kota Tangerang, Banten dibikin heboh dengan kemunculan seekor buaya dengan panjang sekitar 4 meter. Buaya itu muncul di bantaran Kali Sabi, di belakang rumah warga.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang langsung menuju lokasi kejadian setelah menerima laporan warga adanya kemunculan seekor buaya di bantaran Kali Sabi wilayah Taman Cibodas.

"Personel lagi melakukan proses pencarian, tadi posisi buaya di sebelah kiri, sekarang di sebelah kanan. Kita juga lagi siapin perahu juga buat menyebrang," ujar Kepala UPT BPBD Kecamatan Peruk, Kamaludin.

Azizi, Kamis (11/1). Kamaludin menuturkan, kemunculan buaya berukuran besar tersebut pertama diketahui oleh pekerja yang tengah melakukan normalisasi Kali Sabi.

"Buaya cukup lumayan besar 3-4 meter panjangnya. Kebetulan di lokasi lagi ada pengerjaan pengerukan kali Sabi oleh PUPR," ucapnya.

Petugas BPBD dibantu warga sekitar saat tengah berupaya melakukan proses pencarian keberadaan buaya tersebut. Sejumlah alat tangkap sudah disiapkan.

"Kita sudah bikin jaring tali buat menjebak buaya tersebut. Satu kendaraan truk dan 1 perahu sudah disiagakan," jelas Kamaludin. ● pp

BLK Kota Tangerang Buka Pelatihan Operator Komputer

TANGERANG (IM)- Balai Latihan Kerja (BLK) Kota Tangerang Banten membuka kelas operator komputer untuk 20 orang peserta dengan masa pelatihan selama 30 hari mulai 29 Januari 2024.

Kepala UPT BLK pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, Yasin Surya di Tangerang, Kamis (11/1) mengatakan masyarakat yang ingin ikut dalam program ini bisa melakukan pendaftaran melalui aplikasi Tangerang LIVE pada fitur Tangerang Cakap Kerja. Pendaftaran sudah dibuka dan berakhir 24 Januari 2024.

"Ini kelas pertama yang dibuka dari delapan bidang jenis pelatihan yang disiapkan. Pelatihan akan dilaksanakan di BLK Cibodas," kata Yasin.

Ia pun menjelaskan pelatihan dikhususkan bagi masyarakat yang memiliki KTP Kota Tangerang, dengan usia 18-45 tahun.

Semua prosesnya dari mulai pendaftaran, pelatihan hingga dinyatakan lulus dengan mendapatkan sertifikat, dapat diikuti tanpa adanya pungutan biaya atau gratis.

Pelatihan ini dilakukan oleh guru pengajar yang memang kompeten dan profesional di bidangnya dengan menerapkan pembelajaran 25 persen teori dan 75 persen praktik langsung. Sehingga, peserta dapat memanfaatkan pelatihan ini secara maksimal," jelasnya.

BLK juga menyediakan alat tulis, bahan praktik, uang transport, ujian, sertifikat pelatihan berstandar BNSP yang dapat membantu memudahkan para peserta pelatihan selepas lulus dari BLK Kota Tangerang. "Manfaat program ini untuk menambah keterampilan dan wawasan masyarakat yang ingin fokus di bidang komputer," katanya. ● pp



KASUS DBD DI JOMBANG

Seorang balita pasien infeksi virus dengue menjalani perawatan di RSUD Kabupaten Jombang, Jatim, Kamis (11/1). Berdasarkan data Dinkes Jombang, sejak tiga bulan terakhir tercatat sebanyak 11 kasus positif DBD, sementara hingga 10 Januari 2024 tercatat sebanyak 30 orang menjalani perawatan di RSUD karena terkena infeksi virus dengue.

Terlibat Kasus Aborsi, ASN di Kota Bogor Diberhentikan Sementara

BOGOR (IM)- WF, seorang aparatur sipil negara (ASN) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kota Bogor, Jawa Barat, diberhentikan sementara karena diduga terlibat dalam kasus aborsi.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BK-PSDM) Kota Bogor, Hery Karnadi mengatakan, yang bersangkutan telah diberhentikan sementara sejak Desember 2023. "Kalau dari informasi polisi kasus aborsi," kata Hery, saat dikonfirmasi, Kamis (11/1).

Hery menuturkan, keputusan pemberhentian tersebut dilakukan berdasar Undang-Undang (UU) Aparatur Sipil Negara Tahun 2023.

Hery menambahkan, surat pemberhentian tersebut sudah ditandatangani. "Sudah ditandatangani dan diserahkan SK (surat keputusan) pemberhentian sementara selaku PNS sesuai UU ASN 20/2023," kata Hery.

Hery mengungkapkan, pihaknya saat ini masih menunggu hasil putusan pengadilan agar pemberhentian terhadap WF bisa dilakukan secara permanen.

Dia juga menyampaikan bahwa WF tetap menerima gaji sebesar 50 persen meski telah diberhentikan sementara. Namun, yang bersangkutan tidak mendapatkan tambahan penghasilan pegawai atau TPP. "Tidak bisa diberhentikan permanen, karena belum ada putusan sidang. Kalau secara aturan bila jadi tersangkut diberhentikan sementara," sebutnya.

Dari informasi yang diterima, WF telah ditetapkan sebagai tersangka atas adanya laporan polisi nomor LP/B/628/VI/2022/SPKT/POLRESTA BOGOR KOTA/POLDA Jabar tanggal 4 Juni 2022.

Kepala Satuan Reskrim Polresta Bogor Kota, Komisaris Polisi Luthfi Olot Gigantara mengaku akan memeriksa kembali soal laporan tersebut.

Luthfi berdalih, dirinya belum pernah menangani soal kasus tersebut semenjak bertugas sebagai Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota per Desember 2023. "Saya cek ya. Tapi selama saya di Polresta belum pernah tetapi tersangkut kasus tersebut," imbuhnya.

"Mungkin kasusnya sebelum saya jadi Kasat di sini kali ya, karena saya belum pernah nanganin kalau kasus aborsi," pungkasnya. ● gio



TALK SHOW TUNTASKAN AMANAH DI IKHTIAR AKHIR

Walkot Bogor Bima Arya (kedua kiri) bersama sejumlah kepala daerah menjawab pertanyaan wartawan usai mengikuti talk show Tuntaskan Amanah di Ikhtiar Akhir di Balai Kota Bogor, Jabar, Kamis (11/1). Talk show yang diikuti 25 kepala daerah tersebut digelar sebagai bentuk silaturahmi sekaligus rasa syukur atas keputusan MK yang mengabdikan keputusan masa jabatan kepala daerah yang terpilih pada 2018 dan dilantik pada 2019 wajib menjalani masa jabatannya selama lima tahun yaitu sebelum pilkada serentak pada November 2024.

Pemkab Lebak Minta Dana Desa Dapat Dimanfaatkan Atasi Stunting

Pemerintah Kabupaten Lebak bekerja keras untuk menurunkan kasus stunting yang ditargetkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tahun 2024 sekitar 14 persen. Penurunan kasus stunting itu untuk menyiapkan generasi emas tahun 2045, sehingga anak balita yang lahir sekarang harus terbebas dari tengkes.

LEBAK (IM)- Pemerintah Kabupaten Lebak, Banten, meminta dana desa dapat dimanfaatkan untuk mengatasi masalah stunting atau kekerdilan akibat gagal tumbuh yang dialami anak-anak usia di bawah lima tahun.

"Kita meyakini pemanfaatan dana desa secara tepat

asaran dapat menurunkan kasus stunting," kata Kabid Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Lebak, Tuti Nurasih di Lebak, Kamis (11/1).

Pemerintah Kabupaten Lebak bekerja keras untuk menurunkan kasus stunting yang ditargetkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tahun 2024 sekitar 14 persen.

Penurunan kasus stunting itu untuk menyiapkan generasi emas tahun 2045, sehingga anak balita yang lahir sekarang harus terbebas dari tengkes.

Pihaknya menggelar rapat juknis penggunaan dana desa dengan melibatkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) setempat.

Pemanfaatan penggunaan dana desa tahun lalu belum menyentuh dan tidak tepat sasaran untuk percepatan penurunan stunting.

Karena itu, pihaknya

berharap pemanfaatan dana desa bisa menyentuh percepatan penurunan kasus stunting dengan memberikan pelatihan terhadap tim Percepatan Penanganan Stunting (TPPS) desa setempat.

Pelatihan itu, kata dia, nantinya mampu menangani kasus stunting maupun keluarga risiko stunting (KRS) dengan memberikan edukasi pencegahannya.

Selain itu juga memberikan bantuan aneka makanan beragam untuk pemulihan gizi anak dan ibu hamil yang mengalami Kekurangan Energi Kronik (KEK) agar tidak melahirkan anak stunting.

"Kami optimistis pemanfaatan dana desa jadi garda utama agar tidak

lagi kasus stunting baru," kata Hj Tuti.

Pihaknya mengapresiasi jumlah anak yang mengalami stunting di Kabupaten Lebak sampai Desember 2023 sesuai data nama dan alamat (by name and by address) tercatat 3,65 persen atau 3.788 balita.

Sedangkan, berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) prevalensi anak stunting di Lebak sebesar 27,5 persen yang artinya dari 100 anak yang ada di Lebak, 27 di antaranya mengalami stunting.

"Kami optimistis percepatan penurunan stunting di Lebak bisa di bawah 14 persen 2024, karena secara by name by address sudah mencapai 3,65 persen," kata Tuti. ● pra

Inflasi Banten Naik, Pengamat Minta Pemrov Jaga Laju Inflasi

SERANG (IM)- Naiknya inflasi Provinsi Banten pada tahun 2023 menjadi sorotan publik. Sebab, pengendalian inflasi menjadi fokus utama baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Terlebih, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian memberikan warning kepala seluruh Pejabat (Pj) yang ada di daerah termasuk Pj Gubernur Banten untuk serius menangani inflasi di daerah, dan akan menjadi bahan evaluasi.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, pada Desember 2023 terjadi inflasi year on year (yoy) gabungan 3 kota di Banten sebesar 3,06 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 116,56.

Inflasi yoy tertinggi terjadi di kota Cilegon sebesar 3,50 persen dengan IHK sebesar 119,90. Berikutnya di Tangerang sebesar 3,17 persen dengan IHK sebesar 115,37. Inflasi terendah terjadi di Serang sebesar 2,11 persen dengan IHK sebesar 120,24.

Angka itu naik dibandingkan pada bulan sebelumnya yakni pada September 2023 terjadi inflasi secara yoy sebesar 2,04 persen, lalu naik di bulan Oktober 2023 sebesar 2,35 persen dan naik lagi di bulan November 2023 sebesar 3,03 persen.

Menanggapi itu, Pengamat Kebijakan Publik, Yhanu Setiawan menjelaskan, evaluasi terhadap pejabat kepala daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota pada dasarnya bersifat periodik, reguler, berkelanjutan dan

berpijak pada rencana kerja pemerintah.

"Jadi memang periodenya evaluasi, apakah karena ada inflasi atau karena hal-hal yang lain itu tidak relevan terhadap penyebab evaluasi," ujarnya, kemarin.

Dijelaskan Yhanu, pada awal tahun anggaran pergerakan aktivitas pemerintahan baru saja dimulai. Sementara di sisi lain, ekonomi masyarakat juga terus bergerak.

"Kalau di dunia akademis, evaluasi itu emang periodik, minimalnya ada kuis atau uji atas materi yang dioperasikan, lalu evaluasi per tiga bulan (ujian tengah semester), setelah jelang enam bulan ada UAS. Jadi ada periode evaluasinya," tuturnya.

Sementara soal inflasi, kata Yhanu, secara periodik di awal tahun dinilai selalu ada periode lonjakan laju inflasi, seperti kondisi iklim dan cuaca. "Tapi menurut saya yang paling utama adalah, inflasi yang dianggap tinggi tersebut sudah secara komprehensif diantisipasi dan secara umum masih dalam taraf yang bisa dikendalikan. Sehingga tidak sampai menimbulkan situasi yang chaostik atau dramatik," ucapnya.

Ia berharap, Pemrov Banten harus bisa menjaga laju inflasi ke depannya, dan lebih mengutamakan kepentingan umum, khususnya masyarakat Banten.

"Kita berharap, Pemprov Banten harus terus bekerja lebih keras lagi dalam menjaga laju inflasi dan mengutamakan kesejahteraan rakyat pada umumnya," ujarnya. ● pra

Pentingnya Kesetaraan dan Persamaan Hak Layanan bagi Penyandang Disabilitas

BOGOR (IM)- Pj. Bupati Bogor, Asmawa Tosepu menerima pengurus Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Bogor untuk menyerap aspirasi dan masukan dari para penyandang disabilitas di Kabupaten Bogor.

Pada kesempatan tersebut, Asmawa Tosepu mengungkap pentingnya komitmen kesetaraan dan persamaan hak layanan untuk penyandang disabilitas.

Ketua PPDI Kabupaten Bogor dan jajaran pengurus lainnya diterima di Ruang Rapat Wakil Bupati, Sekretariat Daerah, Cibinong, Rabu (10/1).

Hadir mendampingi Pj. Bupati Bogor, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol),

dan perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) penyandang disabilitas bisa mempermudah karena ada kesetaraan.

Kehadiran, peran serta, dan partisipasi penyandang disabilitas dalam pesta demokrasi ini menjadi penting.

"Saya minta Pengurus PPDI dapat menyampaikan kepada seluruh anggotanya di Kabupaten Bogor untuk sama-sama sukseskan pesta demokrasi, karena sangat penting bagi kelanjutan kehidupan berbangsa dan bernegara, serta melahirkan pemimpin bangsa yang dapat membawa Indonesia lebih baik lagi," tandas Asmawa.

Ketua PPDI Kabupaten Bogor, Erfandi mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Bogor atas respon yang cepat dan baik sehingga pihaknya dapat bersilaturahmi dan

beraudiensi dengan Pj. Bupati Bogor.

Menurutnya, selama ini dukungan Pemkab kepada para penyandang disabilitas sudah baik, tinggal bagaimana lebih mengakselerasi lagi UU Nomor 8 tahun 2016. "Kami ingin ada peningkatan akselerasi terhadap implementasi UU No.8 tahun 2016 tentang disabilitas di Kabupaten Bogor, di mana isu utama yang dihadapi adalah terkait, ketenagakerjaan, kesehatan, sarana prasarana, pendidikan, pemberdayaan UMKM," tutur Erfandi.

Ia melanjutkan, ingin Unit Layanan Disabilitas (ULD) segera didirikan, kemudian Pemkab Bogor mendorong adanya pendataan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Bogor agar datanya lebih valid. Serta tetap melibatkan penyandang disabilitas dalam memberikan masukan terhadap perencanaan pembangunan di Kabupaten Bogor. ● gio



Pj. Bupati Bogor ungkap pentingnya komitmen Kesetaraan dan Persamaan Hak Layanan untuk Penyandang Disabilitas.